

Analisis Pemanfaatan Pemekaran Kecamatan dalam Rangka Pembangunan Prasarana di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Andre Simon Reynaldo¹, Jonson Rajagukguk², Artha Lumban Tobing³

^{1,2,3} Universitas HKBP Nommensen

Alamat Surat:

Email: 1andresimon@gmail.com, 2jonson.rajagukguk@uhn.ac.id, 3artha.tobing@uhn.ac.id

Article History:

Diajukan: 8 November 2023; Direvisi: 7 Desember 2023; Accepted: 20 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini Untuk mengetahui Peran Pemerintah desa dalam Analisis Pemanfaatan pemekaran kecamatan dalam rangka Pembangunan prasarana di kecamatan Rimba Melintang, yang Dimana dapat meningkatkan Pembangunan, perekonomian masyarakat desa, dan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan dekriptif Kualitatif, Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, Adapun informan penelitian ini adalah Kepala Camat Rimba Melintang sebagai Informan Kunci, Kepala Seksi Pembangunan sebagai informan Utama, dan Masyarakat sebagai informan tambahan. Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Analisis Pemanfaatan Pemekaran Kecamatan Dalam Rangka Pembangunan Prasarana di Kecamatan Rimba Melintang memiliki sifat berkelanjutan dengan Pembangunan Daerah serta Kecamatan Rimba Melintang Lebih berdampak positif bagi Masyarakat. Dengan demikian desa Rimba Melintang dapat meningkatkan dan mampu menambah prasarana Pembangunan di desa.

Kata kunci: Analisis, Pemekaran, Pembangunan, Prasarana

ABSTRACT

This study is to determine the role of village government in the analysis of the utilization of sub-district expansion in the context of infrastructure development in Rimba Melintang sub-district, which can improve development, the economy of rural communities, and, as well as improve the welfare of rural communities. The type of research used is with a qualitative descriptive approach, Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation, The informants of this research are the Head of the Rimba Melintang Sub-District as the Key Informant, the Head of the Development Section as the Main informant, and the Community as additional informants. The results of this study show that the Analysis of the Utilization of District Expansion in the Framework of Infrastructure Development in Rimba Melintang District has a sustainable nature with Regional Development and Rimba Melintang District has a more positive impact on the community. Thus Rimba Melintang village can improve and be able to add development infrastructure in the village.

Keyword : Analysis, Expansion, Development, Infrastructure

1. PENDAHULUAN

Secara tidak langsung, demokratisasi di Indonesia telah membawa pengaruh pada kebijakan penataan daerah administrasi pemerintahan yang menuju fragmentasi daripada konsolidasi kekuatan bangsa. Peningkatan jumlah daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu dekade pascareformasi ternyata sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal seperti korupsi, inefisiensi ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Berbagai studi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga menyimpulkan bahwa sebagian besar daerah pemekaran justru mengalami kemunduran.

Seiring dengan itu terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah lalu dijadikan sarana pemberdayaan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi.

Otonomi menjadi tumpangan bagi kewenangan daerah untuk mendorong kemandirian sosial kemasyarakatannya hingga ketinggian desa, dan demokratisasi dalam tata pemerintahan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun dari berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak dalam suatu pemekaran. Ada yang menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut.

Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Maka dari itu untuk melakukan pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di

wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Secara historis, Kecamatan merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam struktur sosial, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Kecamatan merupakan institusi sebagai penyambung antara pemerintahan tingkat desa dengan pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh seorang Camat.

Sebagai bagian dari Provinsi Riau, Kecamatan Rimba Melintang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangko. Ketika kita membahas pemekaran kecamatan maka harapan yang timbul adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa tercipta dimana salah satu penopang perkembangannya adalah ketersediaan infrastruktur pokok yang sudah selayaknya dimiliki oleh setiap masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek dalam situasi alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Analisis data penelitian ini adalah menggunakan model analisis data Miles dan Huberman

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Penelitian pemekaran dalam pembangunan merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan kembali dan evaluasi pemanfaatan pembangunan daerah secara spesifik. Proses penelitian pemanfaatan tersebut ditunjukkan untuk memahami hasil yang dicapai. Tujuan ini memerlukan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang terdiri dari prasarana yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil dan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Camat Rimba Melintang dan beberapa pegawai serta masyarakat Kecamatan Rimba Melintang mengenai Bagaimana dampak Pemekaran Kecamatan Rimba Melintang dalam pembangunan prasarana, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembangunan di Desa Rimba Melintang dan Apa saja prasarana yang didapat oleh masyarakat setelah pemekaran Kecamatan.

a. Dampak Pemekaran dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana

Untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran dan pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Rimba Melintang, peneliti telah melakukan wawancara dengan Camat, kepala seksi pembangunan dan beberapa masyarakat Kecamatan Rimba Melintang sebagai pelaksana pembangunan dan penerima manfaat pembangunan tersebut.

Hasil wawancara dengan H. Sukirman, S.Ag, M.Pd.I selaku Camat Rimba Melintang mengatakan bahwa: *“Untuk pendidikan dan kesehatan sangat berdampak bagi masyarakat karena masyarakat sangat mudah bersekolah dan masyarakat sangat mudah mencari pelayanan kesehatan”*.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pemekaran sangat berdampak bagi masyarakat. Pendapat lain dari hasil wawancara kepala seksi pembangunan Harianto, S.AP : *“Untuk pendidikan dan kesehatan sangat berdampak ya bagi masyarakat dengan adanya sekolah masyarakat bisa menikmati pendidikan dan dengan adanya puskesmas masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan dengan baik”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemekaran ini sangat berdampak bagi masyarakat. Pendapat lain dari hasil wawancara kepada masyarakat *“Menurut saya dampaknya saya setiap mengurus berkas cepat jadi ya berdampak bagi saya” “Ya berdampak setelah pemekaran ini jadi mudah mengurus berkas-berkas”. “Saya sebagai mahasiswa melihat kemajuan Kecamatan ini jadi menurut saya sangat berdampak”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat merasakan dampak dari pemekaran Kecamatan ini.

b. Sarana dan Prasarana Pasca Pemekaran

Hasil wawancara dengan H. Sukirman, S.Ag, M.Pd.I selaku Camat mengatakan bahwa : *“Setelah pemekaran masyarakat mendapatkan prasarana kesehatan, pendidikan serta prasarana jalan yang sudah baik”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mendapatkan prasarana seperti sekolah, kesehatan dan jalan. Pendapat lain hasil wawancara dengan Kepala seksi pembangunan *“Ya mereka mendapatkan prasarana yang baik tidak hanya prasarana tetapi alat-alat kesehatan yang semangkin lengkap”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasakan prasarana dengan baik. Pendapat lain hasil wawancara dengan masyarakat : *“Saya kira untuk kelengkapan prasarana di Kecamatan ini sudah mencukupi”* *“Untuk prasarana di Kecamatan ini prasarana sudah banyak sarannya untuk penerangan jalan di perbanyak”* *“Prasarana yang saya lihat di kecamatan ini sudah baik dan memadai”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mendapatkan prasarana yang baik. Ada masyarakat yang membuat saran agar lampu penerangan jalan di perbanyak.

c. Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Pembangunan

Sebelum pemekaran masyarakat setempat di Kecamatan Rimba Melintang tidak berpartisipasi karena tidak adanya pembangunan yang berjalan di Kecamatan tersebut, atau tidak adanya prasarana yang sedang di bangun oleh pemerintah setempat. Tetapi setelah pemekaran berlangsung pada tahun 2014 masyarakat mulai membentuk kelompok per lingkungan desa untuk memulai partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana, partisipasi masyarakat berbentuk gotong royong, mengeluarkan ide-ide mereka serta Sementara itu Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembangunan di Desa Balai Rimba Melintang telah melakukan wawancara dengan Camat, dan masyarakat Kecamatan Rimba Melintang sebagai pelaksana pembangunan dan penerima manfaat pembangunan tersebut.

Hasil wawancara dengan Sukirman, S.Ag, M.Pd.I selaku Camat Rimba Melintang mengatakan bahwa: *“Sejauh ini masyarakat mengikuti pembangunan yang ada di mereka tinggal partisipasinya seperti bergotong royong dan mengeluarkan ide-ide”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpartisipasi untuk pembangunan di tempat mereka masing-masing. Pendapat lain dari Kepala seksi pelayanan. *“Yang saya lihat masyarakat sangat antusias untuk terlibat ke lapangan untuk pembangunan prasarana yang ada”*

Berdasarkan hasil wawancara terlihat masyarakat berantusias untuk pembangunan prasarana. Pendapat lain dari masyarakat :

“Saya sendiri tidak ikut berpartisipasi karena saya berkuliah”

“Karena saya masyarakat disini ya saya ikut berpartisipasi dalam pembangunan prasarana”

“Saya sendiri berpartisipasi seperti gotong royong membuat perbaikan jalan”

Berdasarkan hasil wawancara terlihat ada beberapa masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan prasarana dan ada juga masyarakat tidak terlibat dengan alasan karena sedang kuliah.

3.2. PEMBAHASAN

Untuk partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembangunan di Desa Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang sebelum pemekaran masyarakat yang ada di desa Rimba Melintang Jaya tidak ada bentuk partisipasi dalam pembangunan prasarana di desa tersebut karena tidak adanya tindakan pemerintah untuk melakukan pembangunan prasarana tersebut alasan pemerintah tidak melakukan pembangunan karena kurangnya biaya pembangunan sebelumnya Desa Rimba Melintang masih masuk ke Dalam Kecamatan Bangko, tetapi setelah pemekaran terjadi pada tahun 2014 mulai lah pembangunan seperti kantor camat Rimba Melintang serta Prasarana yang lain seperti sekolah, puskesmas, dan jalan. Setelah itu barulah masyarakat setempat mulai melakukan aktifitas mereka seperti berpartisipasi dalam pembangunan prasarana yang sedang berlangsung seperti gotong royong, mengeluarkan ide-ide, serta melakukan musyawarah bersama untuk melakukan pembangunan prasarana di Desa mereka masing-masing.

Prasarana yang selama ini di dapatkan oleh masyarakat sebelum dan sesudah pemekaran Kecamatan Rimba Melintang. Sebelum terjadinya pemekaran Kecamatan masyarakat tidak mendapatkan prasarana yang mereka inginkan, mereka bisa di bilang sangat tertinggal karena tidak adanya prasarana serta pelayanan publik yang baik. Pada Tahun 2014 barulah pemekaran terjadi disitu banyak sekali pembangunan yang sedang berlangsung seperti pembangunan Sekolah, Puskesmas, Jalan, rumah ibadah serta pembangunan prasarana yang lain seperti Bank dan pelayanan publik (Kantor Camat).

Dampak pemekaran Kecamatan Rimba Melintang dalam pembangunan sarana dan prasarana, setelah pemekaran terjadi pada tahun 2014 disitu banyak sekali pembangunan yang terjadi seperti sekolah negeri, puskesmas, bank BRI, rumah ibadah, serta jarak tempuh ke desa-desa lain sangat dekat karena jalan yang sudah baik Pasti dampak dari pemekaran itu sangat berdampak bagi keberlangsungan ekonomi, bagi masyarakat, dan juga bagi kecamatan yang semakin maju.

Setelah melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Pemekaran Kecamatan dalam Rangka Pembangunan Prasarana di Kecamatan Rimba Melintang, maka ada beberapa hal penting terkait dengan Pemanfaatan Pemekaran Kecamatan Dalam Rangka Pembangunan Prasarana di Kecamatan Rimba Melintang dan kendala yang mesti kita analisis kembali:

- Pertama : Pemekaran Kecamatan Di Rimba Melintang berdampak positif bagi masyarakat, karena dengan pemekaran tersebut pembangunan sarana dan prasarana semakin baik.
- Kedua : Sarana dan Prasarana di Kecamatan Rimba Melintang dibangun pasca pemekaran tahun 2014, dengan pembangunan tersebut prasarana yang tersedia sudah membaik.
- Ketiga : Pasca pemekaran banyak sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah di Kecamatan Rimba Melintang.
- Keempat : Banyak manfaat pemekaran ini terkhusus di bidang kesehatan yang sudah terjangkau jarak tempuhnya dari sebelum pemekaran.
- Kelima : Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selain pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Kecamatan Rimba Melintang juga peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga sangat baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap identifikasi masalah yang diutarakan pada bab terdahulu, pada bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan tentang Pemanfaatan Pemekaran Kecamatan dalam Rangka Pembangunan Prasarana Di Kecamatan Rimba Melintang adalah sebagai berikut:

- Pemekaran Kecamatan berdampak positif bagi Masyarakat Kecamatan Rimba Melintang, karna dengan adanya pemekaran pembangunan sarana dan prasarana semangkin baik.
- Banyak Sarana dan Prasarana yang dibangun pemerintah di Kecamatan Rimba Melintang, harapan masyarakat agar pemerintah lebih meningkatkan pembangunan khususnya di desa-desa pelosok.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ebed Hamri, (2016). “Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Volume. 7. No. 1. Tahun 2016
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000
- Muhammad Syawal, (2016). “Pemanfaatan Jasa Layanan Koleksi Buku Tandon Oleh Mahasiswa Di UPT Perpustakaan UNSRAT”, *e-journalActa Diura* Volume. V. No. 5. Tahun 2016, Manado
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008
- Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2014
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007
- Sahya Anggara, Sumantri, (2016). *Administrasi Pembangunan*, Edisi 1, Bandung: Pustaka Setia
- Sella Ayu, (2014). “Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Kabupaten Gayo”, *Perspektif* Volume. 7. No. 1. Tahun 2014, Aceh
- Siagian Nalom, (2021), Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melaluipemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, *Buletin Studi Ekonomi* <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/63953/39077>, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, pages: 151-164 ISSN : 1410-4628 e-ISSN: 2580-5312
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tri Ratnawati, (2009). *Pemekaran Daerah : Politik dan isu*, Edisi 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar